

Pola Koalisi Partai Politik Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024

Yulita Sitorus¹, Ian Pasaribu^{1*}, Revi Jeane Putri¹, Dori Efendi¹

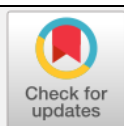
¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, 36361, Jambi-Indonesia

Coresponding Author: ianpasaribu@unja.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Dikirim: 17 Desember 2024;

Diterima: 28 Januari 2025;

Dipublikasi: 30 Maret 2025;



Copyright © 2025. Owned by Author(s), published by Polikrasi

This is an open-access article. License:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:

Sitorus, Y., et al. (2025). Pola Koalisi Partai Politik Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024. *Journal of Politics and Democracy* 4(2), 91-101.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola koalisi dan non-koalisi yang muncul dalam Pilkada Kabupaten Toba 2024, dengan fokus pada strategi yang diterapkan oleh partai-partai politik dalam menetapkan pasangan calon Kepala Daerah. Koalisi dan non-koalisi partai politik di tingkat lokal menjadi elemen penting dalam menentukan hasil Pilkada, karena selain faktor struktural seperti jumlah kursi legislatif, pemilih lokal, dan elektabilitas figur calon turut mempengaruhi dinamika kontestasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana pembentukan koalisi atau keputusan untuk tidak berkoalisi dipengaruhi oleh faktor-faktor politik lokal dan sosial, serta strategi partai dalam menghadapi regulasi ambang batas pencalonan yang baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pilkada Kabupaten Toba 2024, koalisi besar yang dibentuk oleh partai-partai besar lebih menekankan pada efisiensi elektoral dengan perhitungan jumlah kursi, sementara koalisi kecil lebih fokus pada kesamaan visi sosial dan perubahan. Selain itu, fenomena non-koalisi yang diterapkan oleh Partai Nasdem mengilustrasikan penerapan Teori Pilihan Rasional, di mana keputusan untuk bertarung sendiri didorong oleh kalkulasi elektabilitas dan kekuatan figur calon yang cukup kuat. Penelitian ini memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori koalisi politik di tingkat daerah dan bagaimana faktor lokal memengaruhi pembentukan strategi elektoral dalam Pilkada.

This study aims to analyze the coalition and non-coalition patterns that emerged in the 2024 Toba Regency Regional Election, focusing on the strategies employed by political parties in nominating candidates for regional head. Coalition and non-coalition political parties at the local level are crucial elements in determining the outcomes of the election, as structural factors such as legislative seat numbers, local voters, and the electability of candidate figures also influence

the contest dynamics. Using a qualitative approach, this study examines how coalition formation or the decision to remain non-coalition is influenced by local political and social factors, as well as party strategies in responding to the new nomination threshold regulation set by the Constitutional Court. The results of this study indicate that in the 2024 Toba Regency Regional Election, large coalitions formed by major parties emphasize electoral efficiency based on seat calculations, while smaller coalitions focus more on shared social visions and change. Additionally, the non-coalition strategy adopted by the Nasdem Party illustrates the application of Rational Choice Theory, where the decision to run independently was driven by the electoral calculation and the strength of the candidate's figure. This study provides new insights into the development of coalition theory at the local level and how local factors influence the formation of electoral strategies in regional elections.

Keywords: Pemerintah, Pelayanan Kesehatan, Tantangan

1. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola koalisi dan non-koalisi yang muncul dalam Pilkada Kabupaten Toba 2024, dengan fokus pada strategi yang diterapkan oleh partai-partai politik dalam menetapkan pasangan calon Kepala Daerah. Koalisi dan non-koalisi partai politik di tingkat lokal menjadi elemen penting dalam menentukan hasil Pilkada, karena selain faktor struktural seperti jumlah kursi legislatif, pemilih lokal, dan elektabilitas figur calon turut mempengaruhi dinamika kontestasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana pembentukan koalisi atau keputusan untuk tidak berkoalisi dipengaruhi oleh faktor-faktor politik lokal dan sosial, serta strategi partai dalam menghadapi regulasi ambang batas pencalonan yang baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika politik lokal, khususnya dalam konteks Pilkada di Kabupaten Toba, yang menjadi model representasi dari koalisi politik di daerah dengan karakteristik politik yang spesifik.

Dalam kajian tentang koalisi politik, banyak penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya faktor ideologi dan jumlah kursi dalam pembentukan koalisi politik, terutama pada tingkat nasional atau provinsi. Salah satu penelitian yang paling sering dikutip adalah oleh Lijphart (1999) yang memperkenalkan konsep minimal winning coalition (MWC) dan menjelaskan bahwa koalisi dibentuk oleh partai-partai yang memiliki kesamaan ideologi dan cukup besar untuk memenangkan pemilu. Meskipun teori ini banyak digunakan dalam kajian politik, penerapannya dalam konteks Pilkada di tingkat lokal masih terbatas. Studi lain, seperti yang dilakukan oleh Schleiter dan Morgan-Jones (2007), mengemukakan bahwa koalisi politik lokal sering kali dipengaruhi oleh faktor pragmatisme dan jaringan politik lokal, yang lebih memperhatikan elektabilitas figur calon dan dukungan dari tokoh lokal ketimbang kesamaan ideologi semata. Oleh karena itu, kajian tentang koalisi lokal harus lebih memperhatikan dimensi sosial dan budaya yang mempengaruhi pembentukan koalisi.

Penelitian yang lebih terkini, seperti yang dilakukan oleh Tanjung (2021), menyoroti bahwa dalam politik lokal, dinamika sosial dan budaya sering kali lebih mempengaruhi hasil pemilu dibandingkan dengan koalisi besar yang dibangun di tingkat pusat. Tanjung menjelaskan bahwa koalisi yang terbentuk di tingkat lokal sering kali lebih mengutamakan kecocokan antara tokoh politik dengan masyarakat lokal, serta mempertimbangkan faktor-faktor non-struktural seperti hubungan kekerabatan, identitas lokal, dan elektabilitas calon. Penelitian ini menunjukkan bahwa koalisi politik lokal, terutama dalam konteks Pilkada, tidak selalu berlandaskan pada aliansi ideologis atau struktural semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih kontekstual dan situasional. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis koalisi dan non-koalisi dalam Pilkada Kabupaten Toba 2024, dengan harapan dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana faktor lokal, seperti tokoh masyarakat dan preferensi pemilih, memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan strategi koalisi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung telah menjadi instrumen penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia pasca reformasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta perubahan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme rekrutmen politik, tetapi juga sebagai sarana pemberian mandat dan legitimasi langsung dari rakyat kepada pemimpin daerah, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan dan kesejahteraan masyarakat (Huntington & Nelson, 1994). Dinamika politik Pilkada di Indonesia semakin kompleks, terlebih lagi dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mereformulasi ambang batas pencalonan berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk, menggantikan ketentuan lama yang berbasis persentase kursi atau suara. Perubahan regulasi ini menempatkan strategi koalisi dan non-koalisi partai politik sebagai faktor penentu yang sangat strategis dalam menentukan hasil Pilkada, sehingga menjadi sangat relevan untuk diteliti.

Dalam Pemilu Legislatif 2024, jumlah suara sah di Kabupaten Toba tercatat sebanyak 114.704. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi, partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi sedikitnya 10 persen dari total suara sah untuk dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, ambang batas minimal yang harus dipenuhi adalah 11.470 suara sah. Sementara itu, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Toba pada tahun 2024 mencapai 150.643 jiwa. Karena jumlah penduduk masih di bawah 250.000, ketentuan ambang batas 10 persen suara sah tetap berlaku di daerah ini, yang menambah kompleksitas dalam penentuan strategi koalisi partai politik.

Tabel 1 Koalisi Paslon yang diusung oleh Partai Politik pada Pilkada Toba 2024

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi Legislatif	Jumlah Perolehan Suara Sah	Jumlah Persenan Suara Sah
Poltak Sitorus – Anugerah Puriam Naiborhu	1. PDI-Perjuangan	8 Kursi	28.511	24,85 %
	2. Partai Golkar	6 Kursi	22.640	19,73 %
	3. Partai Perindo	2 Kursi	11.983	10,44 %
	4. Partai Demokrat	2 Kursi	8.227	7,17 %
	5. Partai Gerindra	4 Kursi	13.852	12,07 %
JUMLAH		22 Kursi	85.213	74,26 %
Robinson Sitorus – Tonny M Simanjuntak	1. Partai Kebangkitan Bangsa	3 Kursi	11.199	9,76 %
	2. Partai Solidaritas Indonesia	1 Kursi	2.647	2,30 %
	3. Partai Buruh	-	-	-
	4. Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-
JUMLAH		4 Kursi	13.846	12,06 %
Efendi SP. Napitupulu – Audi Murphy Sitorus	1. Partai Nasdem	4 Kursi	14.062	12,26 %
	JUMLAH	4 Kursi	14.062	12,26 %

Meskipun regulasi baru ini memberikan tantangan bagi partai-partai politik dalam menentukan pasangan calon, fenomena koalisi politik di tingkat daerah masih sangat terbatas kajiannya. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang lebih berfokus pada koalisi politik di tingkat nasional atau provinsi besar, di mana struktur politik dan ideologi partai lebih terorganisir dan dipengaruhi oleh dinamika politik nasional (Siahaan, 2017; Lijphart, 1999). Gap penelitian ini menunjukkan bahwa koalisi politik di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Toba, belum banyak dikaji dalam literatur. Sebagian besar studi yang ada mengabaikan pengaruh faktor-faktor lokal, seperti tokoh masyarakat dan pemilih berbasis identitas lokal, dalam pembentukan koalisi atau dalam keputusan untuk tidak berkoalisi, seperti yang terjadi pada Partai Nasdem dalam Pilkada Toba 2024.

Penelitian tentang koalisi politik di tingkat daerah sangat penting karena koalisi lokal tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kursi atau suara, tetapi juga oleh jaringan politik lokal, elektabilitas figur calon, serta pertimbangan pragmatisme dalam merebut dukungan dari pemilih lokal (Schleiter & Morgan-Jones, 2007). Tanjung (2021) menyebutkan bahwa dalam politik lokal, dinamika sosial dan budaya lebih berperan dalam menentukan kemenangan dibandingkan dengan kekuatan struktural yang dibangun melalui koalisi besar di tingkat pusat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada koalisi politik dalam Pilkada Kabupaten Toba 2024, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor lokal memengaruhi pembentukan koalisi serta memahami mengapa beberapa partai memilih untuk tidak berkoalisi, seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Dengan adanya gap penelitian yang jelas terkait koalisi politik lokal dan peran faktor-faktor lokal, studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana koalisi dan non-koalisi partai politik terbentuk di tingkat daerah, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi strategi elektoral dalam Pilkada Kabupaten Toba. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan teori koalisi politik dan praktik politik lokal di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dinamika koalisi dan non-koalisi dalam Pilkada Kabupaten Toba 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pemahaman mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor lokal yang mempengaruhi pembentukan koalisi politik. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif sangat berguna dalam memahami konteks sosial dan budaya yang mendasari tindakan politik dan sosial. Melalui metode ini, data dikumpulkan dengan cara yang lebih fleksibel dan terbuka, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai proses pengambilan keputusan dalam konteks politik lokal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai subjek penelitian. Teknik ini juga memudahkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek yang mungkin tidak dapat diidentifikasi dengan pendekatan kuantitatif, seperti hubungan antar individu, kepercayaan politik lokal, dan interaksi sosial di antara para pemangku kepentingan.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (2009), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan mengelompokkan informasi yang relevan, sehingga temuan yang diperoleh dapat terfokus pada pola-pola tertentu yang penting. Selanjutnya, data yang telah dipilih dan diklasifikasikan disajikan dalam bentuk yang lebih sistematis agar mudah dipahami dan diinterpretasi. Pada tahap terakhir, peneliti melakukan verifikasi untuk menguji validitas temuan, melalui penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat antara elemen-elemen yang ditemukan dalam data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni penggabungan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metodologi yang digunakan untuk mengurangi potensi bias dan meningkatkan akurasi temuan (Flick, 2018). Triangulasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan valid tentang fenomena yang diteliti, serta mengatasi kelemahan inherent yang ada dalam pendekatan kualitatif, seperti subjektivitas dan interpretasi yang terbatas.

3. Hasil dan Pembahasan

Koalisi Politik: Landasan untuk Memahami Dinamika Pilkada

Salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam studi koalisi politik adalah Teori Koalisi Minimal Menang (Minimal Winning Coalition) yang diperkenalkan oleh Lijphart (1999). Teori ini menjelaskan bahwa koalisi terbentuk dengan tujuan untuk mencapai mayoritas yang diperlukan untuk memenangkan pemilu, namun tanpa melibatkan lebih banyak partai dari yang diperlukan. Koalisi yang terbentuk hanya mengikutsertakan partai-partai yang memiliki cukup kursi atau kekuatan untuk memenangkan pemilu. Dalam hal ini, teori minimal menang berfokus pada efisiensi koalisi dalam meraih kemenangan, dengan jumlah partai yang terlibat tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mencapai mayoritas kursi. Dalam penerapannya, teori ini relevan dalam menjelaskan koalisi yang dibentuk berdasarkan pragmatisme elektoral, di mana partai-partai politik berfokus pada pencapaian tujuan praktis, yaitu memenangkan pemilu dengan jumlah kursi yang cukup (Huber, 2014; Subekti & Wahid, 2023). Penelitian

terbaru juga menunjukkan bahwa koalisi minimal menang lebih sering terlihat di negara-negara dengan sistem multipartai, di mana banyak partai kecil yang memiliki peran strategis dalam pembentukan koalisi (Albarelo, 2023).

Teori lain yang relevan adalah Teori Koalisi Terkoneksi Minimal (Minimal Connected Winning Coalition) yang juga dikembangkan oleh Lijphart (1999). Berbeda dengan minimal winning coalition yang lebih menekankan pada jumlah kursi atau suara, teori ini lebih fokus pada keselarasan ideologi dan tujuan antar partai yang membentuk koalisi. Koalisi terkoneksi minimal ini terbentuk ketika partai-partai yang bergabung memiliki visi dan tujuan yang sejalan, meskipun jumlah kursinya mungkin lebih kecil. Dalam koalisi semacam ini, efisiensi terletak pada keselarasan program politik dan ideologi, yang memungkinkan koalisi untuk bekerja lebih solid dan terarah. Dalam konteks politik lokal, teori ini dapat diterapkan pada pembentukan koalisi antara partai-partai yang lebih kecil namun memiliki ideologi yang serupa, yang lebih fokus pada pencapaian tujuan sosial bersama daripada perhitungan jumlah kursi (Mellors & Pijenburg, 2025). Studi terbaru menyoroti bahwa koalisi terkoneksi minimal sering kali lebih stabil di tingkat lokal karena kesepahaman ideologis yang lebih kuat di antara anggotanya, meskipun kekuatan politik mereka lebih terbatas (Müller et al., 2023).

Teori yang ketiga yang sangat relevan dalam menjelaskan pembentukan koalisi dan non-koalisi politik adalah Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) yang dikembangkan oleh Coleman (1990). Teori ini berfokus pada bagaimana aktor politik membuat keputusan berdasarkan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Dalam konteks koalisi politik, teori pilihan rasional menjelaskan bahwa partai-partai politik atau aktor politik akan mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebelum memutuskan untuk berkoalisi, termasuk apakah koalisi tersebut akan menguntungkan dari sisi elektabilitas dan dukungan politik. Keputusan untuk berkoalisi atau tidak berkoalisi tidak hanya didasarkan pada ideologi atau jumlah kursi, tetapi pada kalkulasi rasional mengenai keuntungan politik yang bisa diperoleh, seperti memperkuat posisi calon atau memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenangkan pemilu (Borgatti et al., 2013). Dalam Pilkada Kabupaten Toba, misalnya, keputusan untuk tidak berkoalisi oleh Partai Nasdem dapat dijelaskan melalui teori ini, di mana partai tersebut memutuskan untuk mengandalkan kekuatan figur calon dan dukungan masyarakat lokal yang sudah cukup kuat untuk memenangkan Pilkada tanpa harus bergabung dengan koalisi besar.

Penggunaan teori-teori ini memberikan kerangka yang jelas untuk menganalisis bagaimana koalisi dan non-koalisi terbentuk di tingkat daerah. Teori Koalisi Minimal Menang dan Teori Koalisi Terkoneksi Minimal menjelaskan pembentukan koalisi berdasarkan jumlah kursi atau keselarasan ideologi, sementara Teori Pilihan Rasional menjelaskan keputusan aktor politik berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Semua teori ini membantu untuk memahami bagaimana strategi elektoral dibentuk di tingkat lokal, terutama dalam Pilkada, yang sering kali melibatkan pertimbangan pragmatis dan kalkulasi rasional dalam proses pembuatan keputusan politik. Secara keseluruhan, penelitian ini mengadopsi ketiga teori tersebut untuk memberikan wawasan lebih mendalam tentang pembentukan koalisi dan non-koalisi dalam Pilkada Kabupaten Toba 2024. Dengan menggunakan teori-teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori koalisi politik dan penerapannya dalam konteks politik lokal di Indonesia, yang lebih kompleks dan dinamis.

Pola Koalisi Pasangan Calon Poltak Sitorus-Anugerah Puriam Naiborhu

Koalisi yang mengusung pasangan Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu pada Pilkada Kabupaten Toba 2024 mencerminkan penerapan Teori Koalisi Minimal Menang (Minimal Winning Coalition) yang dikemukakan oleh Lijphart (1999). Teori ini menjelaskan bahwa koalisi dibentuk dengan tujuan untuk mencapai mayoritas yang diperlukan guna memenangkan pemilu, tanpa melibatkan partai-partai yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kemenangan tersebut. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Toba, koalisi yang dibentuk oleh pasangan Sitorus-Puriam Naiborhu terdiri dari lima partai besar, yaitu PDI-Perjuangan, Golkar, Perindo, Demokrat, dan Gerindra, yang menguasai 22 dari 30 kursi di DPRD Kabupaten Toba. Koalisi ini mencerminkan pembentukan koalisi yang efisien, di mana jumlah kursi yang dimiliki cukup untuk memastikan kemenangan tanpa perlu menambah partai-partai lain yang bisa memperumit keputusan politik dan memperpanjang proses negosiasi. Oleh karena itu, koalisi ini berfokus pada perhitungan kursi yang cukup untuk mencapai mayoritas, tanpa melibatkan lebih banyak pihak yang tidak diperlukan.

Koalisi ini lebih mengutamakan efisiensi dan pragmatisme dalam pencapaian kemenangan, ketimbang keselarasan ideologis antara partai-partai yang terlibat. Koalisi yang dibentuk ini tidak semata-mata berdasar pada kesamaan nilai atau ideologi yang mendalam di antara partai-partai tersebut, melainkan lebih pada perhitungan praktis mengenai jumlah kursi yang diperlukan untuk mencapai kemenangan. Dalam hal ini, setiap partai yang terlibat dalam koalisi ini lebih dipilih karena mereka memberikan keuntungan elektoral yang langsung. Keberadaan lima partai besar dalam koalisi ini berfungsi sebagai upaya untuk meraih kemenangan yang efektif melalui pertimbangan pragmatis, dengan menjaga jumlah kursi yang cukup tanpa menambah lebih banyak partai yang dapat meningkatkan kerumitan politik. Dalam perspektif teori minimal menang, koalisi ini dibentuk hanya dengan partai-partai yang diperlukan untuk memastikan kemenangan, dan bukan berdasarkan pada keselarasan ideologi atau nilai bersama di antara partai-partai yang terlibat.

Selain itu, koalisi ini juga menggambarkan bagaimana dinamika politik nasional memberi pengaruh dalam pembentukan koalisi di tingkat daerah. Koalisi besar yang terbentuk di tingkat pusat seringkali menjadi model bagi koalisi di tingkat daerah, di mana dukungan tokoh nasional turut memperkuat legitimasi dan elektabilitas calon di mata pemilih. Partai-partai besar yang mendominasi politik nasional cenderung membawa pengaruh signifikan dalam pembentukan koalisi lokal, karena mereka memiliki basis pemilih yang luas dan struktur organisasi yang kuat. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Toba, koalisi ini tidak hanya diorientasikan pada pencapaian kemenangan elektoral melalui perhitungan kursi yang cukup, tetapi juga pada pengaruh eksternal yang diperoleh melalui dukungan tokoh politik nasional. Oleh karena itu, meskipun koalisi ini diorientasikan pada efisiensi dan pragmatisme, tetap ada dimensi yang tidak bisa diabaikan, yaitu pengaruh politik yang lebih besar dari pusat yang dapat memperkuat daya saing pasangan calon di tingkat lokal. Teori Koalisi Minimal Menang memberikan kerangka yang kuat untuk menjelaskan mengapa koalisi ini dibentuk dengan hanya mempertimbangkan jumlah kursi yang cukup, sementara elemen-elemen eksternal, seperti pengaruh tokoh nasional, turut memperkaya koalisi tersebut.

Pola Koalisi Pasangan Calon Robinson Sitorus-Tony Simanjuntak

Koalisi yang dibentuk oleh pasangan Robinson Sitorus dan Tonny Simanjuntak dalam Pilkada Kabupaten Toba 2024 menggunakan partai-partai yang lebih kecil, seperti PKB, PSI, Partai Buruh, dan PKN, mencerminkan penerapan Teori Koalisi Terkoneksi Minimal (Minimal

Connected Winning Coalition) yang diperkenalkan oleh Lijphart (1999). Teori ini menyarankan bahwa koalisi dapat terbentuk dengan partai-partai yang memiliki kesamaan ideologi atau tujuan politik yang sejalan. Koalisi ini lebih menekankan pada keselarasan visi dan program antar partai yang bergabung, yang memungkinkan mereka untuk bekerja bersama lebih efisien dan solid meskipun jumlah kursi mereka lebih kecil. Berbeda dengan koalisi besar yang lebih fokus pada jumlah kursi untuk mencapai mayoritas, koalisi yang dibentuk oleh pasangan Robinson dan Tonny didorong oleh kesamaan tujuan sosial dan politik untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, sehingga membuat koalisi ini lebih fokus pada pencapaian tujuan bersama yang terdefinisi dengan jelas. Teori Koalisi Terkoneksi Minimal memberi penjelasan yang tepat mengenai pembentukan koalisi ini, di mana alih-alih mengutamakan perhitungan jumlah kursi, partai-partai dalam koalisi ini mengutamakan keselarasan ideologi dan visi yang lebih sejalan.

Penerapan Teori Koalisi Terkoneksi Minimal semakin relevan karena koalisi ini terbentuk berdasarkan kesamaan visi untuk membawa perubahan sosial yang lebih besar. Meski jumlah kursi mereka lebih sedikit dibandingkan koalisi besar, keberhasilan koalisi ini lebih bergantung pada bagaimana partai-partai kecil tersebut dapat bekerja sama secara lebih solid untuk mencapai tujuan bersama, daripada pada perhitungan kursi yang sekadar untuk menang. Dalam hal ini, koalisi ini menggambarkan bahwa kualitas kerjasama politik sering kali lebih penting daripada kuantitas dukungan dalam hal jumlah kursi. Ini menunjukkan bahwa koalisi yang lebih kecil dengan ideologi yang lebih terhubung dan visi yang sejalan dapat lebih efisien dalam mengelola program-program sosial dan politik. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Toba, koalisi ini menawarkan alternatif politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, serta lebih fleksibel dalam merumuskan kebijakan yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, karena kesepahaman yang terbangun di antara partai-partai tersebut lebih dalam.

Dibandingkan dengan koalisi besar yang lebih mengutamakan kalkulasi jumlah kursi, Teori Koalisi Terkoneksi Minimal memberikan penekanan pada pengelolaan koalisi yang lebih efisien dan terfokus pada pencapaian tujuan bersama. Koalisi Robinson-Tonny berusaha menghindari penggabungan partai yang tidak sejalan dengan tujuan politik mereka, sehingga walaupun jumlah kursi yang mereka miliki lebih sedikit, mereka tetap mampu menawarkan sebuah alternatif politik yang lebih berfokus pada kesamaan ideologi dan keberlanjutan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Koalisi ini juga mampu mengatasi tantangan-tantangan yang datang dari berbagai pemangku kepentingan, karena partai-partai yang terlibat telah sepakat pada visi sosial yang lebih inklusif dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, meskipun jumlah kursi tidak sebesar koalisi besar, koalisi ini tetap solid karena adanya kesepahaman mengenai program-program prioritas yang akan diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.

Dengan menggunakan Teori Koalisi Terkoneksi Minimal, kita dapat melihat bagaimana koalisi ini dapat berfungsi lebih efisien dalam mencapainya tujuan bersama meski dengan kekuatan politik yang lebih kecil. Keberhasilan koalisi Robinson-Tonny dalam Pilkada Kabupaten Toba dapat dijelaskan dengan teori ini, yang menyatakan bahwa koalisi yang dibentuk berdasarkan keselarasan ideologi dan tujuan lebih mudah beroperasi dan lebih efisien dalam merumuskan kebijakan. Teori ini juga relevan dengan fenomena koalisi yang tidak hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenangkan pemilu, tetapi juga oleh komitmen bersama untuk membangun perubahan yang lebih berarti bagi masyarakat lokal. Koalisi ini

menunjukkan bahwa keberhasilan politik tidak hanya terletak pada jumlah kursi atau kekuatan struktural, melainkan pada kesamaan tujuan dan komitmen untuk mencapainya.

Pola Non-koalisi Partai Nasdem Pasangan Effendi Napitupulu-Audi Murphy Sitorus

Pola non-koalisi yang diterapkan oleh Partai Nasdem dalam mengusung pasangan Effendi Napitupulu dan Audi Murphy Sitorus pada Pilkada Kabupaten Toba 2024 dapat dijelaskan melalui Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) yang dikembangkan oleh James S. Coleman (1990). Dalam teori ini, aktor politik membuat keputusan berdasarkan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka peroleh, baik dari sisi elektabilitas, dukungan pemilih, maupun sumber daya yang tersedia. Teori ini berasumsi bahwa setiap keputusan yang diambil dalam konteks politik dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil optimal, yaitu keuntungan terbesar dengan biaya atau risiko yang paling rendah. Dalam konteks Partai Nasdem, keputusan untuk maju tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain meskipun ada koalisi besar yang terbentuk oleh partai-partai lainnya, mencerminkan kalkulasi rasional bahwa mereka dapat memenangkan Pilkada dengan mengandalkan kekuatan figur calon dan dukungan masyarakat lokal yang sudah terbangun kuat. Dengan kata lain, Nasdem menilai bahwa mereka tidak perlu bergantung pada koalisi besar karena mereka sudah memiliki aset penting yang cukup—yakni elektabilitas tinggi dari figur calon dan jaringan sosial yang sudah terjalin dengan baik di daerah tersebut.

Menurut Teori Pilihan Rasional, keputusan untuk tidak membentuk koalisi diambil oleh Partai Nasdem karena mereka merasa bahwa elektabilitas pasangan calon mereka sudah cukup kuat untuk memenangkan Pilkada tanpa dukungan tambahan dari partai-partai besar. Keputusan ini menunjukkan bahwa Nasdem lebih memilih untuk mengandalkan figur calon yang sudah populer dan memiliki pengaruh kuat di tingkat lokal, serta jaringan politik yang sudah mapan, daripada harus berkoalisi dengan partai lain yang mungkin membawa tantangan dalam hal kesepahaman ideologi dan program. Dalam hal ini, Teori Pilihan Rasional menjelaskan bahwa keputusan Nasdem untuk bertarung sendiri adalah hasil dari perhitungan yang sangat rasional, berdasarkan analisis keuntungan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Oleh karena itu, keputusan ini bukanlah bentuk isolasi politik, melainkan bentuk perhitungan strategis yang cermat dengan mempertimbangkan kekuatan figur calon yang dapat menggerakkan pemilih secara langsung tanpa harus bergantung pada koalisi besar yang berpotensi menambah hambatan dalam proses kampanye dan pengambilan keputusan.

Lebih jauh lagi, Teori Pilihan Rasional menunjukkan bahwa dalam konteks Pilkada Kabupaten Toba, keputusan untuk tidak berkoalisi juga mencerminkan pemahaman partai tentang dinamika pemilih lokal. Nasdem memperhitungkan bahwa keberhasilan dalam Pilkada tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi atau kekuatan koalisi, melainkan oleh figur calon yang mampu terhubung dengan pemilih dan memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat lokal. Dalam hal ini, Nasdem menilai bahwa calon yang mereka usung memiliki daya tarik elektoral yang cukup besar berkat popularitasnya dan dukungan dari tokoh lokal yang sudah terjalin. Dengan demikian, meskipun koalisi sering dianggap sebagai cara untuk mengamankan kemenangan, Teori Pilihan Rasional membantu kita memahami bahwa strategi Nasdem untuk tidak berkoalisi adalah keputusan yang rasional, di mana keuntungan yang diperoleh dari mempertahankan independensi politik jauh lebih besar daripada risiko bergabung dengan koalisi besar yang bisa membatasi fleksibilitas dan kontrol atas kampanye mereka. Keputusan

ini juga memperlihatkan bahwa dalam politik lokal, keberhasilan politik sering kali tidak hanya terletak pada ukuran koalisi, tetapi pada kekuatan figur, jaringan sosial, dan strategi kampanye yang efektif.

4. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan berbagai pola koalisi dan non-koalisi dalam Pilkada Kabupaten Toba 2024, serta bagaimana faktor-faktor lokal dan strategi partai politik memengaruhi pembentukan koalisi tersebut. Dengan menggunakan Teori Koalisi Minimal Menang, Teori Koalisi Terkoneksi Minimal, dan Teori Pilihan Rasional, penelitian ini menjelaskan bahwa koalisi politik di tingkat lokal lebih didorong oleh perhitungan pragmatisme, keselarasan ideologi, dan kalkulasi rasional daripada hanya sekedar jumlah kursi atau suara. Pada koalisi Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, yang melibatkan lima partai besar, terlihat bahwa koalisi ini dibentuk dengan tujuan mencapai kemenangan elektoral secara efisien tanpa melibatkan lebih banyak partai dari yang diperlukan, sesuai dengan teori minimal menang yang menekankan pada efisiensi dalam mencapai mayoritas. Sebaliknya, koalisi Robinson Sitorus dan Tonny Simanjuntak, yang mengusung partai-partai kecil, menggambarkan Teori Koalisi Terkoneksi Minimal, di mana koalisi terbentuk berdasarkan keselarasan visi dan tujuan sosial-politik yang lebih mendalam, meskipun dengan jumlah kursi yang lebih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi politik lokal sering kali lebih dipengaruhi oleh kesepahaman ideologis dan program bersama daripada hanya perhitungan kursi.

Di sisi lain, keputusan Partai Nasdem untuk tidak berkoalisi dan mengandalkan kekuatan figur calon serta dukungan lokal, seperti yang dijelaskan dalam Teori Pilihan Rasional, menunjukkan bahwa dalam politik lokal, keputusan untuk berkoalisi atau tidak berkoalisi sangat dipengaruhi oleh kalkulasi rasional mengenai keuntungan elektoral yang bisa diperoleh. Meskipun banyak partai memilih untuk membentuk koalisi guna meningkatkan peluang kemenangan, Nasdem memutuskan bahwa mereka dapat memenangkan Pilkada dengan mempertahankan independensi politik dan memanfaatkan popularitas calon serta dukungan kuat dari tokoh lokal. Keputusan ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam politik lokal tidak hanya bergantung pada ukuran koalisi atau kekuatan struktural, tetapi juga pada figur yang dapat terhubung langsung dengan pemilih. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika koalisi politik di tingkat daerah dan pentingnya faktor-faktor lokal, seperti tokoh masyarakat dan elektabilitas figur calon, dalam membentuk strategi politik yang efektif. Penelitian ini juga membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam teori koalisi politik, khususnya dalam konteks politik lokal Indonesia yang kompleks dan dinamis.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Albarello, A. (2023). Coalition policy in multiparty governments: Whose preferences prevail. *Political Science Research and Methods*, 12(2), 318–335. <https://doi.org/10.1017/psrm.2023.15>
- Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2013). *Analyzing social networks*. SAGE Publications.
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Huber, S. (2014). Coalitions and voting behavior in a differentiating multiparty system. In *Oxford University Press eBooks* (pp. 65–87). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199662630.003.0004>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Democracy in developing countries: Africa*. Lynne Rienner Publishers.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Mellors, C., & Pijnenburg, B. (2025). Political parties and coalitions in European local government. In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9781003632795>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Müller, W. C., Bäck, H., & Hellström, J. (2023). Coalition dynamics: Advances in the study of the coalition life cycle. *West European Politics*, 47(1), 1–30. <https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2249316>
- Schleiter, P., & Morgan-Jones, E. (2007). The political economy of coalition formation in the developing world. *Comparative Political Studies*, 40(3), 1–28. <https://doi.org/10.1177/0010414006291057>
- Siahaan, P. (2017). Politik koalisi dan dinamika pemilu di Indonesia. *Jakarta: Pustaka Politik*.
- Subekti, D., & Wahid, M. (2023). The political parties coalition behaviour in election: A meta-analysis. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 183–192. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3111>
- Tanjung, H. (2021). Partai politik dan koalisi di tingkat daerah: Studi kasus di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 12(2), 45–62.